

LKJIP 2022



BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas Prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam bentuk Laporan Kinerja tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk informasi dan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022, guna menginformasikan atas capaian kinerja pada pengelola keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

Akhirnya Laporan ini dapat menjadi sarana dan evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih baik, efektif dan efisien, dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tenggarong, 20 Februari 2023.


Kepala:
SUKOTJO, S. E.
Pemimpin Muda (IV/c)
NIP. 19730908 199302 1 001.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	4
1.3. Sumber Daya Manusia	7
1.4. Saran dan Prasarana	9
1.5. Keuangan	12
1.6. Permasalahan Utama dan Isu Strategis	12
1.7. Strategi dan Kebijakan	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1. Rencana Kerja Tahun 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Realisasi Anggaran	26
3.3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Kepala Daerah dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2021 - 2026. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah:

1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :



1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3465);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kutai kartanegara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2021, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dijelaskan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah adalah sebagai berikut :

1.2.1 Kedudukan

BPKAD merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang BPKAD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok

BPKAD melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

1.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BPKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



1.2.4 Susunan Organisasi

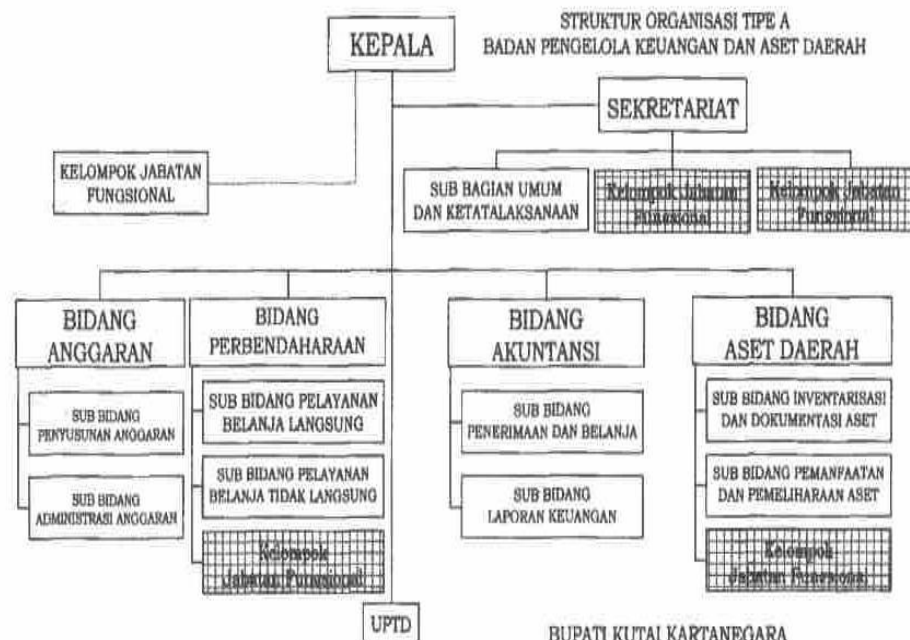
1. Susunan Organisasi BPKAD terdiri dari
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Jabatan Fungsional.
 3. Jabatan Fungsipnal.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Administrasi Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Pelayanan Belanja Tidak Langsung; dan
 3. Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penerimaan dan Belanja; dan
 2. Sub Bidang Laporan Keuangan.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi ASet;
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan; dan
 3. Jabatan Fungsional.
 - g. UPTB; dan



2. Bagan Struktur Susunan Organisasi Perangkat Daerah BPKAD Type A.

Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2021 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum
Purnomo, SH., MH
Nip19780605 20021 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

td
EDI DAMANSYAH



1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BPKAD.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 sebanyak 185 orang. Penjelasan mengenai pegawai BPKAD disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.3.1
Jabatan dan Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020

Jabatan		Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
A	<i>Pejabat Struktural</i>				
	Kepala (Eselon II/b)	1	1	0	1
	Sekretaris (Eselon III/a)	1	1	0	1
	Kepala Bidang (Eselon III/b)	4	3	1	4
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	1	1	0	1
	Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	8	7	1	8
B	<i>Jabatan Fungsional Tertentu</i>	4	3	1	4
C	<i>Fungsional Umum</i>	148	90	58	148
	<i>Fungsional Umum Non PNS</i>				

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2022



Tabel 1.3.2
Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	0	0	0
S2	9	3	12
S1	28	33	61
Diploma III	4	2	6
Diploma II	0	0	0
Diploma I	0	0	0
SLTA	64	23	87
SLTP	1	0	1
SD	0	0	0

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN BPKAD yang berpendidikan S1 dan SLTA memiliki jumlah paling banyak yaitu masing-masing 67 dan 61 orang. Sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 24 orang. ASN berdasarkan pangkat/golongan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 1.3.3
Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2021

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
Pembina Tk. I (IV/b)	1	0	1
Pembina (IV/a)	8	1	9
Penata Tk. I (III/d)	18	22	40
Penata (III/c)	3	7	10
Penata Muda Tk. I (III/b)	4	6	10
Penata Muda (III/a)	5	2	7
Pengatur Tk. I (II/d)	48	19	67
Pengatur (II/c)	13	4	17



Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5	0	5
Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2022

Adapun tenaga kerja non Pegawai yang dipekerjakan sebagai pelaksana administrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 sebanyak 58 orang

1. Tenaga Administrasi : 49 Orang
2. Sekretaris Pribadi : -
3. Sopir : -
4. Waker : 7 Orang

1.4 Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan inventaris kantor/aset kantor yang secara umum dikelola atau dikoordinir sekretariat, yang dalam operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawabnya.

Secara ringkas sebaran Sarana dan prasarana kantor pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 1.4.1
Daftar Barang BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

No	Jenis	Sekretariat	Bid. Anggaran	Bid. Perbendaharaan	Bid. Akuntansi	Bid. Aset Daerah	Bid. Pengembangan Aset	Jumlah
A	Kendaraan operasional							
1	Kendaraan Roda 4	5	1	1	1		1	9 unit
2	Kendaraan Roda 2	7		1		1	1	10 unit
B	Alat Kantor dan Rumah Tangga							
1	Mesin Foto copy dengan Kertas double Folio	3	1	3	1	1	1	10 buah
2	Lemari Kaca	2						2 buah
3	Alat Penghancur Kertas	6						6 buah
4	Cassette Recorder	1						1 buah
5	Amplifiler	2						2 buah
6	Loudspeaker	10						10 buah
7	Sound System	6	2	1		1	1	11 buah
8	Microphone	1						1 buah
9	Alat Hiasan	113		9				122 buah
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	89	1	1				91 buah
11	Gorden	3						3 buah
12	P.C. Unit	28	32	34	31	34	24	183 buah
13	Lap Top	9	2	5	2	11	3	32 buah
14	Note Book	13	10	4	5	1	6	39 buah
15	Printer	26	34	32	25	20	20	157 buah
16	Server			1		1		2 buah
17	Perkakas Pengangkat Lain-lain	5	2	1		1	1	10 buah
18	Jam Ukur (Meet Lock)	8	2	1	3	1		15 buah
19	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2	2	2		1		7 buah
20	Mesin Ketik Elektronik			2				2 buah
21	Mesin Hitung Elektronik							10 buah
22	Lemari Besi	2	2	1				5 buah



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

23	Lemari Kayu		13					13 buah
24	Mesin Absensi	1	1	1	1	1	1	6 buah
25	Papan Struktur Instansi	2	2	1				5 buah
26	Mesin Penghancur Kertas	4	4	6		2	1	17 buah
27	Sofa	6						6 buah
28	Moubiler Lainnya			1				1 buah
29	Mesin Penghisap debu	1						1 buah
30	Lemari ES	5	1	1		1	1	9 buah
31	Kipas Angin	4						4 buah
32	Televisi	8	3	13	1	1		26 buah
33	Wireless	2						2 buah
34	Tangga Alumunium	1						1 buah
35	Dispenser	2	1	2	1	1	1	8 buah
36	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1						1 buah
37	Bola Api	1	1	1	1	1	1	6 buah
38	CCTV	2		3				5 buah
39	Hard Disk	13	15		18			46 buah
40	Scanner	1	1		2			4 buah
41	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	5					6 buah
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	25	36	27	4	5	111 buah
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	3		2			9 buah
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	78	45	30		1	158 buah
45	Proyektor + Attachment	3	7		3	3		16 buah
46	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6	43	9	10	8	3	79 buah
47	Peralatan studio Visual Lain-lain	6	4			3	1	14 buah
48	Camera Electronic	8	5				9	22 buah
49	Facsimile	4	1				1	6 buah
50	Lukisan Cat Air	8					2	10 buah

Sumber: Bagian Umum dan Ketatalaksanaan BPKAD, 2022



1.5 Keuangan.

Pada tahun 2022. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendapat alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp 778,480,183,202,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Jura Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah)** dengan Realisasi sebesar **Rp. 668.472.957.708,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah)**

Tabel Alokasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	Keterangan
1	Belanja Operasi.	110.905.260.072,00	34.482.152.132,00	31,09 %
2	Belanja Modal	2.275.206.000,00	1.893.621.832,00	83,23 %
3	Belanja Tidak Terduga	41.196.260.000,00	10.717.074.540,00	26,01 %
4	Belanja Transfer	624.103.457.130,00	621.239.622.804,00	99,54 %
Jumlah		778.480.183.202,00	668.472.957.708,00	85,87 %

1.6 Permasalahan utama dan isu strategis

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Masih terdapat alokasi belanja daerah yang belum sesuai dengan program dan kegiatan prioritas.
2. Penggunaan Anggaran masih ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Serapan anggaran untuk belanja daerah yang masih dibawah standar 90%
4. Masih kurangnya kemampuan SDM pada OPD dalam bidang Akuntansi.
5. Masih terdapat pengurus barang pada OPD yang kurang memahami peraturan pengelolaan barang milik daerah.
6. Masih terdapat asset tidak bergerak yang belum memiliki status hukum yang jelas
7. Masih kurangnya perhatian pengurus barang daerah terhadap panatausahaan barang milik daerah.

ISU – ISU STRATEGIS

1. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
2. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan BMD



3. Peningkatan kualitas penatausahaan Keuangan Daerah.
4. Peningkatan kualitas Penganggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Peningkatan Kompetensi SDM.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

1.7 Strategi dan kebijakan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan tata kerja serta mewujudkan tujuan OPD maka ditetapkan visi misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Adapun Visi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, yaitu :

“ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia ”

Bertitik tolak dari Visi, Misi yang relevan, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Visi Perangkat daerah berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah :

VISI :

“ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ”

Sejalan dengan visi di atas, maka misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

MISI :

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola Aset dengan Baik
3. Predikat Akuntabilitas BPKAD.

TUJUAN :

Adapun tujuan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:



MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH
1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

SASARAN :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

SASARAN RPJMD	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.	1. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan. 2. keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat BPKAD



Tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat Akuntabilitas BPKAD	B	BB	BB	BB	BB	BB	A
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.	Dokumen	0	0	25	29	29	29	29
		2. keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah.	Dokumen	0	0	25	29	29	29	29
		3. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan.	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program untuk mewujudkan visi dan misi, disamping strategi hal terpenting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan.

Dari gambaran diatas maka disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
- 2) Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal
- 3) Peningkatan kinerja pelayanan
- 4) Penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyusunan LKPD yang partisipatif dan akuntabel
- 6) Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah
- 7) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
- 8) Pemenuhan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

- 1) Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Pengembangan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya
- 3) Pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja pelayanan
- 4) Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dalam mewujudkan laporan yang akuntabel
- 5) Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah
- 6) Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja Tahun 2022.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui berbagai kegiatan, dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan.

berikut ini disajikan rumusan sasaran IKU untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Visi Daerah : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia.
 Misi Daerah : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
 Visi Perangkat Daerah : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional, Akuntabel dan Transparan
 Misi Perangkat Daerah : 1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat Akuntabilitas BPKAD	B	BB	BB	BB	BB	BB	A
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indek Pengelolaan Keuangan daerah	Skor	-	-	6	6,5	6,9	7,3	7,5
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	-	25	25	29	29	29	29
			keterbukaan	-	25	25	29	29	29	29



			Informasi pengelolaan Keuangan Daerah							
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang Undangan -	100	100	100	100	100	100	100

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusunlah suatu Perjanjian Kinerja 2022 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencaai kinerja dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi OPD. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional sepenuhnya dapat dirujuk pada perjanjian kinerja tahun 2022 ini.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi RPJMD	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia.
Misi RPJMD	:	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih,Efektif, Efisien Dan Melayani.
Visi Perangkat Daerah	:	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional, Akuntabel dan Transparan
Misi Perangkat Daerah	:	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tujuan Perangkat Daerah	:	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD.	Predikat Akuntabilitas BPKAD	Tingkat	BB



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
2	Indek Pengelolaan Keuangan daerah	Skor IPKD	Skor	6
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	25
		keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	25
	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	Persentase	100

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan (APBD)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.		APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	394,019,000,-	APBD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	78,469,493,464,-	APBD
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	40,000,000,-	APBD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	478.050.909,-	APBD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	4,342,630,431,-	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	12,967,023,052,-	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1,612,755,800,-	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.		
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.	4,550,000,000,-	APBD
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.	1,682,829,526,-	APBD
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2,366,319,000,-	APBD
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	665,599,717,130,-	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.		5,050,204,179,-	APBD
	Jumlah		778,480,183,202,-	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja BPKAD merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja BPKAD Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Target dan Capaian Kinerja BPKAD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target kinerja sasaran dan tujuan sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Hal ini disajikan di Tabel 3.1.1 yang memuat capaian kinerja BPKAD lima tahun terakhir.

Tabel. 3.1.1
Pencapaian Kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat Akuntabilitas BPKAD	B	BB	BB	BB	BB	BB	A		A	.	.	.	.
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indek Pengelolaan Keuangan daerah	Skor	0	0	6	6,5	6,9	7,3	7,5		63,5367	.	.	.	.



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KOND ISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungja waban Keuangan	0	25	25	29	29	29	29	29	-	-	-	-	
			keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	0	25	25	29	29	29	29	29	-	-	-	-	
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang Undangan	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	

Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan telah menetapkan Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dan telah dapat diukur tingkat pencapaiannya, pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dilihat dari tabel diatas Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Predikat Akuntabilitas BPKAD

Pada tahun 2022, Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai sebesar **88,85 (Delapan Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Lima)** atau dengan predikat penilaian “ **A** ” (**Memuaskan**), sebagaimana Tabel Berikut :



No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Peningkatan /Penurunan capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	25,76	27,43	Meningkat
2	Pengukuran Kinerja	25	15,73	19,38	Meningkat
3	Pelaporan Kinerja	15	9,38	15,00	Meningkat
4	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	10	4,88	7,04	Meningkat
5	Pencapaian Kinerja	20	15,25	20,00	Meningkat
Total		100	70,99	88,85	Meningkat
Kategori			BB	A	
Interprestasi			Sangat Baik	Memuaskan	

2. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan dari hasil Pengukuran 6 Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :

- Dimensi Kesesuaian Dokurmen Perencaraan Dan Penganggaren;
- Dimensi Pengaiokasian Anggazan Belanja Daiam APBD;
- Dimensi Transparensi Pengeloiaan Keuangan Daerah;
- Dimensi Penyerapan Anggaran;
- Dimensi Kondisi Kcuangan Daerah; Dan
- Dimensi Opini Badan Pemeriksa Kevargan Atas LKPD.

Maka diperoleh skor untuk Tahun Anggaran 2021 adalah ; 63,5367

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi

- Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan. (capaian IKU, 29 Dokumen)
- Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (capaian IKU, 29 Dokumen).

4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor : 42 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka dari seluruh OPD telah memenuhi semua ketentuan tersebut (Capaian IKU= 100%)



3.1.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja serta capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.
Capaian Indikator Program Tahun 2022
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No	Program/ Kegiatan / Indikator	VOLUME		CAPAIAN		
		K	Satuan	K	Satuan	%
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
5 02 01 2.0 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	100	persen	100	persen	100
5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	persen	100	persen	100
5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
1	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	persen	100	persen	100
5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
1	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	100	persen	100
5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	persen	100	persen	100
5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	persen	100	persen	100
5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	persen	100	persen	100



No	Program/ Kegiatan / Indikator	VOLUME		CAPAIAN		
		K	Satuan	K	Satuan	%
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
1	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100	persen	100	persen	100
2	Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100	persen	100	persen	100
3	Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	persen	100	persen	100
4	Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100	persen	100	persen	100
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
1	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	persen	100	persen	100
2	Persentase Transaksi Non Tunai	100	persen	100	persen	100
3	Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	90	persen	100	persen	100
4	Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	persen	100	persen	100
5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
1	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100	persen	100	persen	100
2	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100	persen	100	persen	100
3	Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100	persen	100	persen	100
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
1	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100	persen	100	persen	100
5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100	persen	100	persen	100
2	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	persen	100	persen	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	persen	100	persen	100
4	Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	persen	100	persen	100



Dari table diatas dapat dilihat pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Capaian Kinerja 100%, akan tetapi masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Penilaian Barang Milik Daerah, harus menyesuaikan dengan waktu / jadwal DJKN/KPKNL untuk melakukan penilaian.
- Belum ada TIM penilai dari Pemerintah Daerah sehingga tidak dapat melegalkan hasil penilaian.
- Aset tanah yang akan disertifikatkan, terkendala proses di BPN.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan merupakan faktor penting bagi OPD. Dalam penyelenggaraan operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, memperoleh alokasi dana sebesar **Rp 778,480,183,202,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Jura Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah)** dengan Realisasi sebesar **Rp. 668.472.957.708,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	Keterangan
1	Belanja Operasi.	110.905.260.072,00	34.482.152.132,00	31,09 %
2	Belanja Modal	2.275.206.000,00	1.893.621.832,00	83,23 %
3	Belanja Tidak Terduga	41.196.260.000,00	10.717.074.540,00	26,01 %
4	Belanja Transfer	624.103.457.130,00	621.239.622.804,00	99,54 %
Jumlah		778.480.183.202,00	668.472.957.708,00	85,87 %

Dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat alokasi dana **Rp 778,480,183,202,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Jura Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah)** dan realisasi pada tahun 2022 sebesar **Rp. 668.472.957.708,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah)**, dengan realisasi keuangan mencapai **85,87 %** dengan rincian sebagai berikut :



LRA TAHUN ANGGARAN 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4. 04 Keuangan Unit Organisasi : 4. 04 . 02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	5.261.622.191.495,00	6.822.270.659.689,38	129,66	3.675.266.470.259,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.134.074.495,00	54.789.179.637,38	113,83	55.263.840.589,19
4.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.120.806.628,00	21.232.144.048,86	66,10	19.768.619.228,31
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	16.013.267.867,00	33.557.035.588,52	209,56	35.495.221.360,88
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.209.738.117.000,00	6.764.448.480.052,00	129,84	3.615.376.629.670,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.606.260.415.410,00	6.153.698.018.616,00	133,59	3.215.256.827.670,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	4.429.357.061.410,00	5.976.853.751.616,00	134,94	3.174.738.835.670,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	40.517.992.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	176.903.354.000,00	176.844.267.000,00	99,97	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	603.477.701.590,00	610.750.461.436,00	101,21	400.119.802.000,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	561.362.821.590,00	568.635.581.436,00	101,30	318.277.302.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	42.114.880.000,00	42.114.880.000,00	100,00	81.842.500.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.750.000.000,00	3.033.000.000,00	80,88	4.626.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.750.000.000,00	3.033.000.000,00	80,88	4.626.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	778.480.183.202,00	668.472.957.708,00	85,87	438.163.128.308,00
5.1	BELANJA OPERASI	110.905.260.072,00	34.482.152.132,00	31,09	32.407.390.168,00
5.1.1	Belanja Pegawai	78.810.391.444,00	110.905.260.072,00	22,50	17.876.117.087,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.094.868.628,00	16.747.415.059,00	52,18	14.531.273.081,00
5.2	BELANJA MODAL	2.275.206.000,00	2.034.108.232,00	89,40	1.280.105.415,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.077.446.000,00	1.893.621.832,00	91,15	469.135.622,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	359.689.793,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	197.760.000,00	140.486.400,00	71,04	451.280.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.196.260.000,00	10.717.074.540,00	26,01	84.714.812.822,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	41.196.260.000,00	10.717.074.540,00	26,01	84.714.812.822,00
5.4	BELANJA TRANSFER	624.103.457.130,00	621.239.622.804,00	99,54	319.760.819.903,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	624.103.457.130,00	621.239.622.804,00	99,54	319.760.819.903,00



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Urusan Pemerintahan : 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04	Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.483.142.008.293,00	6.153.797.701.981,38	137,27	3.237.103.341.951,19
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	842.366.182.490,00	842.314.384.611,00	99,99	1.137.649.704.118,87
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	842.366.182.490,00	842.314.384.611,00	99,99	1.137.649.704.118,87
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	24.400.000.000,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	24.400.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	838.616.182.490,00	838.564.384.611,00	99,99	1.113.249.704.118,87
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.321.758.190.783,00	6.992.362.086.592,38	131,39	4.350.353.046.070,06

Tenggarong, 1 Januari 2023

PENGUNA ANGGARAN



SUKOTJO,SE

NIP. 197309081993021001



3.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Tahun 2022 antara lain :

1. Tidak tersediaya tenaga Apresial atau Penilai tersertifikasi yang dimiliki oleh BPKAD.
2. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan, karena kesalahan penganggaran.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target Kinerja BPKAD, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kepada ASN yang ada di BPKAD untuk mengikuti pendidikan formal sebagai tenaga Apresial/ penilai, melalui Tugas Belajar.
- b. Memberikan bimbingan kepada JF Perencana atau Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait proses penganggaran, (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Rncian Sub Kegiatan agar tidak terjadi kesalahan penganggaran.
- c. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, anggaran serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini semoga dapat mendorong pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa mendatang lebih baik dan terus ditingkatkan sehingga sesuai dengan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada akhirnya akan terwujud aparatur pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Tenggarong, 20 Pebruari 2023
Kepala Badan ;

SUKADONS. E.
NIP. 1973090781993021001

LAMPIRAN

- Tabel Renstra 2021 – 2026
- Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022
- Tabel Rencana Kinerja Perubahan 2022
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
- IKU.
- Rencana Aksi Tahun 2022
- Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022

LAMPIRAN (Sekurang-kurangnya) : 1. Pengukuran Kinerja; 2. Perjanjian Kinerja; 3. Matrik Rencana Strategis; 4. Lain – lain yang dianggap perlu